

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah saat ini telah menghadapi permasalahan dan keterpurukan ekonomi di dalam kehidupan masyarakat yang kini tengah menghadapi gelombang pandemi covid19. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam masyarakat untuk memberikan kontribusi maupun keuangan untuk menunjang kehidupan masyarakat yang terkena dampak perekonomian covid19.

Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akan tetapi, kualitas kinerja yang terjadi di instansi banyak mengalami ketidakstabilan dengan kurangnya kontribusi dan partisipasi dalam melakukan perencanaan anggaran atas pelaksanaan program kegiatan, dalam hal ini anggaran adalah bentuk pilihan

politik, maka postur anggaran daerah adalah bukan sebuah hasil produksi dari sebuah mekanisme yang rasional, akan tetapi target dan sasaran kebijakan politik anggaran belum bisa dipahami khalayak secara mudah, apalagi bila gaya komunikasi eksekutif juga kurang benar dalam mensosialisasikan apa yang ingin dicapai dengan kebijakan tertentu. Jadi Intinya, bila anggaran tidak dikelola dengan baik dan benar, pilihan-pilihan prioritas kebijakan anggaran akan menimbulkan masalah serius, yang kalau ditarik secara mendasar dapat berakibat pada terganggunya dan menurunnya kualitas pelayanan publik, hal tersebut dapat terjadi karena Pemerintah Daerah gagal memahami prioritas aspirasi masyarakat, sedangkan masyarakat tidak mengerti apa yang dimau dan akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan.

Berikut Laporan Realisasi kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya (BPKPD) Tahun Anggaran 2017 :

Tabel 1.1

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2017

Badan Pengelolaan Keuangan Pajak dan Daerah Kota Surabaya

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	30.581.409	
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.962.206.768	
3.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	27.799.861.362	
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.876.695.596	
5.	Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan	3.914.885.050	
	TOTAL	42.584.230.185	

Sumber : www.surabaya.go.id (Data diolah, 2021)

Tabel 1.2

Laporan Realisasi Kegiatan Badan Pengelolaan keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2017

No	Triwulan	Nominal	Persentase (%)
1	Triwulan I	9.189.343.187	21,58
2	Triwulan II	11.162.367.531	26,21
3	Triwulan III	10.595.364.585	24,88
4	Triwulan IV	11.637.154.882	27,33
	Jumlah	42.584.230.185	100

Sumber : www.surabaya.go.id (Data diolah, 2021)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Selama periode Tahun Anggaran 2017 Laporan Realisasi Kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya mengalami fluktuasi, fluktuasi yaitu

ketidaktetapan kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan. Pada triwulan I sebesar 21,58%, Triwulan II sebesar 26,21 %, Triwulan III sebesar 24,88 %, dan Triwulan IV sebesar 27,33%. maka dapat disimpulkan bahwa selama periode Tahun Anggaran 2017 akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya mengenai laporan realisasi kegiatan berfluktuasi terhadap anggaran dan realisasinya sebesar Rp 42.584.230.185.

Dilihat dari sisi alokasi anggaran lebih besar dari apa yang terealisasi hal ini berarti Badan Pengeolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya tidak menggunakan penyerapan anggaran sesuai rencana atau kinerja yang tidak ekonomis, disebabkan kinerja yang kurang maksimal atau adanya program yang tidak dijalankan sehingga menimbulkan permasalahan yang menyebabkan kinerja instansi tidak berjalan dengan baik dari instansi pemerintah itu sendiri. Dapat dilihat bahwa realisasi kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya pada tahun anggaran 2017 dapat dikatakan kurang efisien.

Pemerintah Daerah tentunya sudah melakukan pengelolaan rincian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan melakukan Rencana Realisasi Kegiatan dalam tahun anggaran ini yang nantinya anggaran covid tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sehingga diperlukan adanya transparansi anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian bagi masyarakat.

Adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, agar alokasi anggaran dapat

sesuai dengan sasaran maka diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pegawai dan aparatur organisasi (Ernawilis, 2015). Sehingga dalam hal ini masyarakat mampu untuk menilai bagaimana kinerja yang terjadi pada pemerintahan. Berhasil atau tidaknya kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawabannya terhadap publik (Laksana dan Handayani,2014).

Adapun yang dimaksud dengan akuntabilitas kinerja Pemerintah adalah salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dalam pemerintahan sangat tergantung pada pengelolaan keuangan atau anggaran yang digunakan untuk pengoperasian, belanja, dan aktivitas lainnya yang digunakan negara.

Salah satu karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran, dan ketepatan anggaran dengan adanya sasaran anggaran dan ketepatan anggaran yang jelas maka, akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran yang sesuai dengan yang ingin dicapai organisasi. ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan agar tercapai target anggaran (McPhee, 2008). Maka pernyataan tersebut sependapat dengan

Mulyadi (2010:490), yang menyatakan salah satu karakteristik anggaran, menganalisis dan menjelaskan kinerja keuangan anggaran serta selisihnya.

Proses penyusunan anggaran sangat diperlukan pemerintah daerah untuk dapat mencapai suatu kinerja keberhasilan organisasi Pemerintah. Dalam Penyusunan Anggaran diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Syarifuddin (2013: 30) menyatakan bahwa penyusunan anggaran diharapkan akan meningkatkan kinerja para manajer, dimana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipatif disetujui, maka karyawan akan menginternalisasikan tujuan yang ditetapkan, dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena mereka ikut terlibat dalam penyusunan anggaran tersebut.

Secara umum, pengendalian manajerial di instansi pemerintah berfokus pada pusat pertanggungjawaban yang merupakan alat untuk melakukan strategi dan program kegiatan yang telah diseleksi melalui proses perencanaan sebelumnya. Fokus pengendalian organisasi sektor publik adalah dengan keberhasilan pelaksanaan strategi yang digunakan secara efektif dan efisien. Efisiensi dan efektifitas merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur prestasi kerja manajemen (Handoko, 2002).

Penelitian yang dilakukan oleh Isnanto, Suharno dan Widarno (2019) bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas kinerja. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Kartika dan Sukanto (2019) bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan Adanya kejelasan sasaran anggaran akan memudahkan penyusunan target-target anggaran. Akan tetapi berbeda dari hasil penelitian

yang dilakukan oleh Pratama,Agustin dan Taqwa (2019) bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bahwa hal ini keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak bergantung kepada kejelasan sasaran yang baik yang di buat oleh bagian perencanaan anggaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak mempermudah aparat pemerintah dalam menyusun dan mencapai target-target anggaran yang telah di tetapkan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Netty Herawatty (2011) yang menyatakan kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki peranan penting dalam menerapkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Made dan Ni Luh (2015) bahwa Ketepatan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pratiwi dan Amanah (2019) bahwa ketepatan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Dan sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2018) Ketepatan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Secara umum, ketepatan anggaran berkaitan dengan sasaran dari setiap kegiatan untuk mencapai target anggaran (McPhee, 2008). Hal ini didukung dengan pendapat Mardiasmo (2011) yang menyatakan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran *financial*.

Astari (2015) dalam penelitiannya menyatakan pengendalian manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja SKPD. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Made dan Ni Luh (2015) bahwa pengendalian manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas

kinerja SKPD. Penelitian yang dilakukan oleh Pramitha dan Gayatri (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian manajerial sektor publik dengan akuntabilitas kinerja SKPD dan memiliki hubungan yang positif. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Amanah (2019) menyatakan bahwa pengendalian manajerial sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Proses pengendalian manajemen adalah proses dimana para manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan.

Beberapa Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja antara lain penelitian Made dan Ni Luh (2015) menyatakan Pengaruh ketepatan anggaran dan pengendalian manajerial sektor publik pada akuntabilitas kinerja SKPD. Adapun penelitian lain dengan variabel berbeda yang dilakukan oleh Pratiwi (2019) menyatakan bahwa pengaruh ketepatan sasaran anggaran, kualitas SDM, dan pengendalian manajerial terhadap akuntabilitas kinerja, dan sama halnya penelitian dengan variabel berbeda yang dilakukan oleh Pratama, Agustin dan Taqwa (2019) menyatakan bahwa pengaruh pengendalian akuntansi, sistem pelaporan, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Made dan Ni Luh (2015). Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel kejelasan sasaran anggaran. Penelitian ini dilakukan karena kejelasan sasaran anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya sangat penting. Banyak beberapa instansi Pemerintah Daerah tidak transparan terkait dengan perencanaan anggaran yang

sudah susun sebelumnya, sehingga patut masyarakat menanyakan kejelasan sasaran anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah selama ini. Artinya dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan pemerintah dalam mengukur keberhasilan setiap program kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengukuran yang tepat baik itu dalam bentuk evaluasi ataupun yang lainnya, akan membuat organisasi mengetahui seberapa baik kinerja yang telah dilakukan (Herawaty, 2011).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh ketepatan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, pengendalian manajerial terhadap akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah ketepatan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Dearah Kota Surabaya?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Dearah Kota Surabaya?
3. Apakah pengendalian manajerial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Dearah Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Bersumber dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menguji pengaruh ketepatan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Dearah Kota Surabaya
2. Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Dearah Kota Surabaya
3. Untuk menguji pengaruh pengendalian manajerial terhadap akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Dearah Kota Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Anggaran Pemerintahan Daerah sekaligus menambah bukti empiris mengenai pengaruh ketepatan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian manajerial terhadap akuntabilitas kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Dearah Kota Surabaya (BPKPD).

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Anggaran Pemerintah Daerah sekaligus guna mempraktekkan pengetahuan yang telah diperoleh peneliti selama mengikuti perkuliahan.

b. Manfaat bagi Instansi Terkait

Hasil penelitian diharapkan akan menjadi bahan masukan kepada instansi untuk terus meningkatkan mutu akuntabilitas kinerja dalam melakukan perencanaan anggaran agar selalu dapat berkembang lebih baik dari sebelumnya serta dapat memberikan gambaran atas pengaruh , ketepatan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian manajerial di masa yang akan datang.

c. Manfaat bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan untuk menambah referensi dan litelatur yang dapat menambah kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang anggaran Pemerintah Daerah dan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

d. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang anggaran Pemerintah Daerah.